



Pengalaman Mahasiswa Dalam Menghadapi Seksisme Di Lingkungan Organisasi

Kartika Dewanti¹

Universitas Bengkulu

email: tikadwt@gmail.com

Riza Ayu Lestari²

Universitas Bengkulu

email: : rizaayulestari23@gmail.com

Elfrida Hotmauli Sitorus³

Universitas Bengkulu

email: : elfridahotmaulisitorus@gmail.com

Gina Aprillia⁴

Universitas Bengkulu

email: : aprilliagina37@gmail.com

Kariza Rossa Juliana⁵

Universitas Bengkulu

email: : karizarossa21@gmail.com

*Korespondensi: email: tikadwt@gmail.com

Abstrak

History Artikel:
Diterima 7 September 2025
Direvisi 10 September 2025
Diterima 25 September 2025
Tersedia online 1 Oktober 2025

The purpose of this study is to learn about the experiences of students who encounter sexism in student groups and to develop preventative and remedial measures. As informal educational settings, student organizations are perfect for fostering social awareness, networking, and leadership skills. Reality, however, demonstrates that sexism still poses a serious obstacle, particularly for female students and those who exhibit non-conforming gender characteristics. Through in-depth interviews with students who are involved in organizations and have firsthand experience with sexism, this study combined a qualitative technique with a phenomenological method. Purposive sampling was used to choose participants in order to guarantee a range of backgrounds. Phenomenological reduction was used to examine the data, which included organizing, analyzing, and determining the main themes of the experiences of the participants. Triangulation was used to test their validity. According to the findings, students encountered sexism in the form of verbal harassment based on gender, unfavorable stereotypes, male dominance in decision-making, discrimination in leadership positions, and degrading remarks. In addition to limiting opportunities for active engagement and expression, the ensuing effects included psychological pressure that lowered the caliber of students' contributions. The introduction of a zero-tolerance policy against sexism, anti-discrimination communication training, gender awareness education, and the creation of a safe reporting channel through the PPKS Task Force are among the prevention tactics that have been identified. In order to establish a campus environment that is safe, equal, and free from discrimination, this study highlights the significance of changing an organizational culture that is inclusive and gender-responsive, encompassing the entire academic community.

Kata kunci:

sexism, students, student organizations, phenomenology, gender equality

Pendahuluan/ مقدمة

Organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu wadah pembelajaran nonformal yang penting bagi mahasiswa. Kehadiran organisasi tidak hanya menjadi sarana pengembangan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen, tetapi juga ruang pembentukan karakter serta penguatan kepekaan sosial. Organisasi, mahasiswa belajar bekerja sama, memperluas jejaring, serta mengasah kemampuan kritis dalam menyikapi persoalan di sekitarnya. Idealnya, ruang organisasi kemahasiswaan harus menjadi tempat yang aman, inklusif, dan mendorong partisipasi setara tanpa diskriminasi. Namun, kenyataannya, dinamika organisasi sering kali tidak sepenuhnya bebas dari persoalan struktural maupun kultural yang menghambat terciptanya lingkungan yang adil dan setara contohnya salah satu persoalan berkaitan dengan ini ialah seksisme.

Seksisme merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender yang berakar pada relasi kuasa tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Seksisme dapat muncul dalam bentuk stereotip, prasangka, candaan merendahkan, hingga pelecehan seksual yang berdampak pada berkurangnya partisipasi aktif seseorang dalam ruang sosialnya. Candraningrum (2014) menegaskan bahwa seksisme bersifat eksistensial karena menyentuh tubuh, pikiran, dan perasaan seseorang yang dianggap inferior sehingga dapat dijadikan objek hinaan atau olok-olok. Masalah ini sering kali dinormalisasi melalui anggapan bahwa seksisme hanyalah bentuk “hiburan ringan”, sehingga membuat korban enggan untuk melawan atau bahkan merasa tidak berhak untuk tersinggung. Dalam ranah psikologi sosial, Glick dan Fiske (2001) mengembangkan teori *ambivalent sexism* yang membagi perilaku seksisme menjadi dua kategori, yakni *hostile sexism* dan *benevolent sexism*. *Hostile sexism* merujuk pada sikap misoginis yang secara terang-terangan menolak atau merendahkan perempuan yang tidak mengikuti peran gender tradisional. Bentuknya dapat berupa pandangan negatif terhadap perempuan yang mencoba tampil dominan, aktif, atau menantang norma gender. Sebaliknya, *benevolent sexism* lebih samar karena diselubungi sikap yang tampak positif, seperti menempatkan perempuan sebagai sosok lemah, lembut, dan perlu dilindungi. Meski memberikan kesan penghargaan, sikap ini justru menyakinkan stereotip gender tradisional serta menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan yang harus menjadi pelindung atau pengambil keputusan.

Persoalan seksisme tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga berkelindan dengan struktur sosial dan budaya masyarakat. Di Indonesia, seksisme menjadi bagian dari fenomena kekerasan berbasis gender yang masih tinggi angkanya. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, naik 14,17 persen dari tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2024). Angka tersebut memperlihatkan bahwa diskriminasi berbasis gender masih menjadi tantangan serius. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menyebutkan satu dari dua remaja usia 13–17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan, dan 33,64 persen di antaranya mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (KemenPPPA, 2024). Fakta ini relevan dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, karena mereka berada pada kelompok usia yang sama dan rentan mengalami diskriminasi maupun seksisme. Lingkungan pendidikan tinggi sebagai ruang intelektual ternyata juga tidak sepenuhnya bebas dari persoalan ini. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya praktik seksisme dalam kehidupan organisasi mahasiswa. Misalnya, candaan seksis yang dianggap wajar, pembagian kerja yang bias gender di mana perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi administratif atau konsumsi, hingga pengabaian terhadap pendapat mahasiswa perempuan dalam forum diskusi (Astuti, 2024). Budaya maskulinitas toksik juga kerap muncul dalam proses kaderisasi, pertemuan, maupun kegiatan lapangan, yang berujung pada terciptanya ruang yang kurang ramah bagi perempuan (Himmah UII, 2024). Kondisi ini membuat mahasiswa perempuan sering kali tidak mendapatkan ruang kepemimpinan yang sama dengan laki-laki. Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital. Laporan SAFEnet

(2024) menyebutkan bahwa kelompok usia 18–25 tahun merupakan korban terbanyak kekerasan berbasis gender online (KBGO). Media sosial, forum diskusi daring, maupun grup percakapan organisasi menjadi ruang baru di mana seksisme dapat berlangsung. Bentuknya bisa berupa komentar bernuansa seksual, pengiriman materi pornografi, hingga pelecehan melalui pesan pribadi. Hal ini memperluas dimensi seksisme dari ranah tatap muka ke ranah digital, sehingga menambah tantangan dalam menciptakan ruang organisasi mahasiswa yang aman.

Meskipun pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk menanggulangi kekerasan seksual di kampus, implementasinya masih menghadapi hambatan serius. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta Persesjen No. 17 Tahun 2022 menjadi dasar hukum untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Namun, survei Ditjen Diktiristek (2020) menunjukkan 77 persen dosen mengakui kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, sementara 63 persen kasus tidak dilaporkan karena hambatan struktural dan kultural. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas di lapangan, di mana normalisasi praktik seksisme masih berlangsung terutama di ruang-ruang informal seperti organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengalaman mahasiswa dalam menghadapi seksisme di lingkungan organisasi kampus menjadi sangat relevan. Kajian ini penting tidak hanya untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk seksisme yang dialami mahasiswa, baik dalam wujud *hostile* maupun *benevolent*, tetapi juga untuk menggali strategi yang digunakan mahasiswa dalam meresponsnya. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan strategi pencegahan dan penanganan seksisme yang lebih efektif di lingkungan kampus. Penelitian ini juga bertujuan mendukung terwujudnya lingkungan organisasi kemahasiswaan yang inklusif, adil gender, serta bebas dari diskriminasi.

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi guna menggali pengalaman mahasiswa dalam menghadapi seksisme dalam konteks organisasi kemahasiswaan. Metode fenomenologi merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap makna terdalam dari pengalaman seseorang terhadap suatu fenomena tertentu (Aflah, 2025). Metode fenomenologi pada penelitian ini dipilih supaya peneliti dapat memahami secara lebih mendalam makna subjektif yang dirasakan oleh partisipan terkait bentuk, konteks, dan efek seksisme dalam kegiatan organisasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa yang terlibat aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan memiliki pengalaman langsung mengenai fenomena seksisme.

Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (dalam Ani, 2021), *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel dengan alasan tertentu. Ini berarti proses pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Teknik *purposive sampling* pada penelitian ini diterapkan untuk menentukan partisipan yang dianggap paling mewakili dan relevan dengan fokus penelitian, dengan memperhatikan keberagaman latar belakang gender, jenis organisasi, serta tingkat keterlibatan dalam organisasi mahasiswa. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk mempertahankan kebebasan dalam mendapatkan informasi, sambil mengarahkan diskusi agar tetap pada inti permasalahan penelitian. Seluruh sesi wawancara direkam dan selanjutnya ditranskripsikan secara akurat untuk mempermudah proses analisis data.

Analisis data dilakukan dengan metode reduksi data fenomenologis yang meliputi langkah-langkah seperti pengumpulan, pengorganisasian, dan penafsiran data yang berguna untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dari narasi partisipan. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun strategi pencegahan dan penanganan seksisme yang

dapat diterapkan dan relevan dengan situasi yang ada di lingkungan organisasi mahasiswa. Serta, penerapan triangulasi data juga dilakukan untuk menjamin validitas temuan melalui perbandingan data dari berbagai sumber serta verifikasi oleh peserta.

Hasil & Diskusi

Pengalaman Mahasiswa Menghadapi Seksisme di Lingkungan Organisasi Kemahasiswaan Kepribadian seseorang kaitannya dengan dimana lingkungan mereka dan bagaimana orang sekitarnya memperlakukannya. Setiap kampus membentuk karakter dari mahasiswanya, jika kampus tersebut tidak memperdulikan masalah yang berkaitan dengan gender maka tidak akan ada kejadian negatif yang akan menimpa mahasiswa di kampus itu begitu pula sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk seksisme yang dialami mahasiswa terutama dialami oleh mahasiswi. Organisasi kemahasiswaan didapatkan seringkali berbentuk perlakuan diskriminatif dan stereotip gender pada mahasiswi. Mahasiswi banyak melaporkan adanya keterbatasan akses untuk pemilihan posisi kepemimpinan dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan organisasi. Mereka mendapat komentar merendahkan dan bahkan pelecehan verbal yang berkaitan dengan gender dan penampilan fisik dalam organisasi kampus. Sementara mahasiswa yang memiliki identitas gender yang berbeda dari norma maskulinitas dominan pada laki-laki umumnya juga menghadapi stereotip negatif sehingga menjadi tantangan mahasiswa tersebut untuk aktif dalam organisasi. Stereotip ini memunculkan tekanan psikologis pada mahasiswa-mahasiswi terkait dengan gender sehingga menurunkan partisipasi aktif dan kualitas serta kontribusi mereka dalam organisasi.

Hal ini sesuai dengan hasil studi Amanda (2024), yang menunjukkan banyak pemimpin perempuan di organisasi mahasiswa mendapatkan perlakuan seksisme berupa penilaian negatif dan diskriminasi struktural, perempuan dianggap tidak tegas serta tidak dapat mengembangkan organisasi menjadi lebih baik. Hakiki (2021) menegaskan bahwa seksisme sebagai prasangka berpengaruh signifikan pada *sense of community* dan performa organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa seksisme tidak hanya persoalan individual, tetapi juga bersifat sistemik, tersebar dalam budaya organisasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap kesetaraan gender. Perlakuan seksisme kepada mahasiswa di lingkungan organisasi kampus akan berdampak besar pada kesehatan mental seseorang, mental seseorang pastinya berbeda-beda sekecil apapun perlakuan yang didapatkan akan menimbulkan efek, karena adanya proses komunikasi yang dimana komunikan (orang yang menerima pesan) akan memproses apa yang disampaikan oleh komunikator (orang yang menyampaikan pesan/dapat disebut orang yang memperlakukan seksisme kepada orang lain) sehingga apa yang disampaikan akan termuat dalam memori otak dan akhirnya berdampak pada kesehatan mental orang tersebut, apalagi jika setiap hari otak komunikan distimulus oleh tindakan-tindakan negatif orang sekitar yang ditunjukkan dengan penolakan argumen perempuan pada rapat internal maupun eksternal organisasi oleh anggota laki-laki.

Strategi Pencegahan dan Penanganan Seksisme

Organisasi kampus memiliki dinamika dimana anggotanya harus cepat beradaptasi, tetapi dimasa adaptasi ini banyak terdapat seksisme terhadap sesama anggota yang membuat para anggota seperti terjebak pada organisasi yang katanya solidaritas tetapi membuat mental anggotanya diuji dengan adanya perlakuan seksisme ini. Pada penelitian ini penulis menyampaikan untuk menghindari terjadinya seksisme dengan efektif adalah edukasi dan pelatihan kesadaran gender yang rutin dilakukan untuk membongkar mitos dan stereotip gender serta membekali anggota organisasi dengan kemampuan komunikasi anti-diskriminasi. Ini sejalan dengan rekomendasi Telkom University (2025) dan Wulandari (2024), yang menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan untuk membangun budaya inklusif pada organisasi kampus. Kebijakan tegas yang mengatur larangan seksisme dan pelecehan seksual serta mekanisme pelaporan aman dan transparan sangat dibutuhkan demi adanya keadilan bagi

mahasiswa-mahasiswi yang mendapatkan perlakuan seksisme atau stereotip lainnya yang berkaitan dengan gender, kebijakan ini akan terealisasi jika pihak kampus tegas dan benar-benar memberikan sanksi besar bagi pelaku seksisme. Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan organisasi kemahasiswaan menjadi solusi strategis untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban Peraturan Menteri Pendidikan, yang tertuang dalam peraturan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Salah satu kampus yang memiliki organisasi serupa untuk menindaklanjuti adanya kekerasan di kampus yaitu di Universitas Bengkulu yang bernama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT). Instagram organisasi satuan pencegahan dan penanganan untuk menghindari terjadinya masalah gender seperti seksisme di Universitas Bengkulu yaitu @satgas_ppkpt_unib, berikut gambar instagramnya:



Gambar 1 Instagram PPKT Universitas Bengkulu

Satgas ini juga sudah diterapkan oleh beberapa kampus lainnya, besar dampaknya dengan adanya satgas ini. Permasalahan seksisme dapat berkurang tetapi tetap saja untuk mengurangi terjadinya seksisme ialah dari internal organisasi kampus harus diperbaiki dan tidak adanya perbedaan perlakuan seperti tidak menerima argumen dari anggota perempuan. Hal ini dapat dicegah dengan memilih pimpinan yang mengerti dan *awareness* terkait seksisme dan permasalahan gender lainnya, maka peran pimpinan organisasi sangat sentral sebagai agen perubahan yang memastikan implementasi kebijakan tanpa diskriminasi dan memantau budaya organisasi secara berkala. Penelitian lain (Zai, K 2024; Komnas Perempuan, 2025) menyebutkan perlunya supervisi pimpinan dan evaluasi sistematis untuk memastikan kesetaraan gender terwujud dalam praktik organisasi kemahasiswaan. Strategi ini dapat perilaku seksisme dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan aman dan mendukung bagi seluruh anggota.

Selain edukasi dan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk pelecehan seksual dan diskriminasi gender harus menjadi landasan utama organisasi kemahasiswaan. Kebijakan ini perlu dirumuskan dengan jelas dan teliti, termasuk definisi pelecehan seksual, sanksi bagi pelaku, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses serta aman bagi korban dan saksi agar tidak adanya kekhawatiran saat pelaporan. Prosedur pelaporan harus dilengkapi dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan terhadap intimidasi bagi pelapor, bila perlu membuat perjanjian di atas kertas dengan memakai materai sebagai tanda hukum. Keberadaan unit khusus atau satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di tingkat organisasi kemahasiswaan berfungsi untuk menampung laporan, memberikan pendampingan psikologis,

dan mengawasi tindak lanjut kasus. Strategi ini diadopsi dari panduan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Organisasi kemahasiswaan sangat penting halnya untuk membangun ekosistem dukungan yang melibatkan berbagai pihak seperti dosen, tenaga kependidikan, dan lembaga kemahasiswaan lain untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan responsif terhadap isu seksisme. Mahasiswa diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye anti-seksisme melalui berbagai aktivitas seperti seminar, diskusi, lomba kreatif konten edukasi, dan pemilihan duta anti kekerasan seksual, dukungan besar dari pihak kampus akan membuat mahasiswa lebih *awareness* terhadap isu gender seperti seksisme. Kegiatan ini selain menambah wawasan juga memperluas jaringan solidaritas antar mahasiswa. Dukungan dari lembaga eksternal, seperti LSM dan aparat penegak hukum, juga sangat dibutuhkan untuk memberikan akses bantuan hukum dan perlindungan bagi korban. Maka, pencegahan seksisme dan pelecehan seksual dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Implikasi untuk Penciptaan Ruang Kampus yang Aman, Inklusif, dan Bebas Diskriminasi

Solusi untuk mengatasi dan menghindari seksisme di lingkungan organisasi kampus dapat terjadi dengan adanya pengembangan ruang kampus yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi dimana terdapat pendekatan terpadu yang melibatkan kebijakan, edukasi, dan pemberdayaan seluruh civitas akademika. Penelitian ini menekankan bahwa berhasil atau tidaknya pengurangan pengalaman seksisme di lingkungan kampus dapat diukur dengan penciptaan lingkungan organisasi kemahasiswaan yang mengedepankan kesetaraan gender dan menghormati keberagaman identitas, jika komitmen seluruh pihak, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa tetap berjuang memberikan keadilan bagi korban seksisme dan menghadapi rintangan bersama. Implementasi kebijakan responsif gender, seperti yang sudah dilakukan di Universitas Warmadewa dan UIN Syahada, harus dilengkapi dengan adanya mekanisme pengaduan yang efektif, transparan, dan memberikan perlindungan bagi pelapor agar tidak mengalami intimidasi atau balas dendam. Selain itu, penetapan kuota beasiswa untuk perempuan dan perlindungan hak cuti melahirkan menjadi langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan gender dalam hal akses pendidikan dan kesempatan berorganisasi.

Menciptakan ruang aman dan bebas diskriminasi serta meningkatkan kepercayaan mahasiswa ditengah banyaknya pemberitaan tentang kekerasan di kampus dapat dimulai dengan memberikan kebebasan organisasi dalam hal positif. Organisasi kemahasiswaan dapat berperan sebagai agen advokasi yang menginisiasi program-program berbasis nilai inklusif, seperti pelatihan kesadaran gender, workshop anti-diskriminasi, dan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender. Aktivitas tersebut berpotensi memperluas pemahaman seluruh anggota organisasi tentang pentingnya menciptakan ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, demi tercapainya tujuan ini dapat dilakukan dengan diadakannya pada setiap organisasi kampus dan organisasi kampus saling bekerja sama untuk hasil yang maksimal. Pelibatan mahasiswa dalam peran serta aktif ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap budaya organisasi yang sehat dan setara demi langkah awal penciptaan organisasi sehat sehingga angkatan yang lainnya dapat meningkatkan kinerja organisasi ke arah yang lebih positif.

Solusi demi menghindari dan penanganan tindakan seksisme dengan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di tingkat kampus dan organisasi kemahasiswaan menjadi strategi sangat penting yang harus didukung dengan sumber daya memadai dan kerja sama dari setiap elemen di kampus. Satgas ini berfungsi sebagai garda depan dalam menerima laporan, melakukan verifikasi, serta memastikan tindak lanjut kasus kekerasan atau diskriminasi dengan pendekatan yang

manusiawi dan profesional. Keberadaan Satgas yang transparan mampu membangun kepercayaan korban dan seluruh civitas akademika terhadap sistem mekanisme penanganan masalah. Terealisasinya tindakan pencegahan seksisme ini harus berbarengan dengan prosedur pelaporan yang mudah diakses oleh mahasiswa-mahasiswi diberbagai metode seperti laman daring, hotline telepon, dan layanan tatap muka, sehingga mempermudah korban dan saksi untuk melapor tanpa hambatan.

Implikasi kampus dalam penanganan seksisme ini dapat juga dilakukan dengan pemberian pendidikan dan sosialisasi tentang kesetaraan gender serta pencegahan kekerasan seksual yang dimulai sejak awal mahasiswa memasuki lingkungan kampus. Beberapa perguruan tinggi seperti UIN Walisongo telah mengintegrasikan materi tersebut dalam program pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) untuk mahasiswa baru. Pendekatan ini bertujuan membangun karakter dan sikap mahasiswa yang menghormati hak asasi manusia serta menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan lanjutan seperti pelatihan asertif, pelatihan *bystander intervention*, dan kampanye kesadaran berkelanjutan menjadi sarana efektif untuk memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan seluruh civitas akademik paa isu seksisme.

Penerapan implikasi ruang yang aman bagi mahasiswa di lingkungan oragniasi kampus sangat erat kaitannya dengan sikap pimpinan. Pimpinan organisasi kemahasiswaan harus mengambil peran strategis sebagai agen perubahan yang mempromosikan kesetaraan gender dan menegakkan kewajiban anti-diskriminasi. Kepemimpinan inklusif mampu mempengaruhi norma dan sikap anggota organisasi untuk menjauhkan diri dari perilaku seksisme. Pengadaan evaluasi rutin dan pemantauan implementasi kebijakan organisasi menjadi kunci agar program yang sudah dirancang tidak berhenti di tengah jalan, dan benar-benar membawa perubahan signifikan dalam praktik organisasi. Kolaborasi lintas unit dan fakultas, serta dukungan dari lembaga eksternal seperti Komnas Perempuan dan lembaga advokasi, turut memperkuat upaya memenangkan budaya kampus yang aman, inklusif, dan demokratis. Hal ini dapat terjadi dengan adanya pimpinan organisasi yang kuat pengaruhnya sehingga dapat memperluas relasi kepihak berwenang demi terciptanya organisasi sehat dan berkelanjutan.

Melalui komitmen yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten dari seluruh elemen kampus, ruang kampus yang inklusif dan bebas diskriminasi dapat menjadi tempat yang mendukung pengembangan potensi semua mahasiswa secara optimal dan manusiawi. Ruang kampus yang inklusif dengan maksud inklusif ini berarti lingkungan pendidikan tinggi yang menyediakan akses, kesempatan, dan fasilitas yang setara bagi semua mahasiswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan fisik, agama, gender, kondisi ekonomi, atau perbedaan lainnya akan meminimalisir oknum ataupun pelaku memiliki motif diskriminasi sehingga berkurang pula adanya kejadian seksismes antar mahasiswa-mahasiswi di kampus. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan psikologis tapi juga keberhasilan akademik dan karier masa depan mereka karena tindakan seksisme akan meninggalkan bekas pada pelaku dan korbannya, maka penciptaan lingkungan kampus yang aman akan berdampak baik bagi organisasi kampus sekaligus menciptakan generasi muda yang mampu menghargai keragaman dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan setara.

Kesimpulan/ الخلاصة

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman mahasiswa, terutama perlakuan anggota yang berbeda ketika anggota perempuan menyampaikan pendapat dikarenakan adanya stereotip yang menganggap pendapat perempuann tidak penting dan tidak kuat untuk menjadi landasan mengambil Keputusan dan itu termasuk tindakan seksisme di lingkungan organisasi kemahasiswaan Dampak dari seksisme tersebut bukan hanya membatasi ruang gerak dan peran mahasiswi dalam mengambil keputusan, tetapi juga menghalangi terbentuknya suasana organisasi yang inklusif dan produktif. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan program

yang diterapkan demi penanganan Tindakan seksisme, tantangan seperti stereotip buruk, perkataan kasar, hingga kekerasan seksual masih menjadi hambatan besar yang memerlukan perhatian terus menerus dari semua pihak yang terlibat dalam lingkungan kampus. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kesadaran bersama dan perubahan budaya organisasi yang mendalam, sehingga tidak hanya aturan formal tetapi juga tindakan sehari-hari menerapkan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak setiap orang dan adanya satuan pencegahan seperti sebuah organisasi yang menangani orang-orang yang terlibat Tindakan seksisme. Salah satu penerapan organisasi ini yaitu di Universitas Bengkulu Bernama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT), kinerja organisasi ini dapat dilihat pada salah satu media sosialnya yaitu akun instagram @satgas_ppkpt_unib.

Pelaksanaan strategi pencegahan dan penanganan yang meliputi edukasi kesadaran gender, kebijakan *zero tolerance*, serta pembentukan mekanisme pelaporan dan pendampingan yang responsive, aman disertai perjanjian di atas kertas serta penambahan materai demi kerahasiaan korban dan saksi akan menjadi pondasi penting dalam membangun ruang kampus yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi. Organisasi kampus dapat berperan dalam mengadvokasi serta menegakkan nilai-nilai inklusif melalui program-program pendidikan, dialog terbuka, dan dukungan aktif bagi korban. Partisipasi aktif semua elemen kampus dan sinergi dengan lembaga internal dan eksternal yang memiliki komitmen serupa memperkuat keberlanjutan perubahan positif di lingkungan akademik. Harapannya, dengan kerja sama yang menyeluruh ini, semua mahasiswa dapat mengembangkan potensi maksimalnya dalam suasana yang bebas dari hambatan diskriminasi berbasis gender, dan ruang organisasi mahasiswa yang aman sehingga menjadi cermin ideal dari nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Saran untuk penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memfokuskan kejadian seksisme dalam satu organisasi kampus yang sama sehingga lebih fokus dan pembahasan menyeluruh terhadap satu kampus saja.

Referensi/المصادر والمراجع

- Aflah, Fadli Ramadhanul & Sri Murhayati. (2025). Penelitian Fenomenologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13099-13109.
- Amanda, K. S., Rahardjo, T., & Ayun, P. Q. (2022). Isu seksisme dan relasi gender dalam kepemimpinan perempuan di organisasi mahasiswa Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 55–70. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Amanda, K. S., Rahardjo, T., & Ayun, P. Q. (2024). Isu Seksisme Dan Relasi Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan di Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro. *Interaksi Online*, 12(3), 422-434.
- Ani, J., Bode L., & Jeffry L. A. T. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada E-Commerce Tokopedia di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 663-674.
- Astuti, R. (2024). Bias gender dalam organisasi kemahasiswaan: Studi kasus pembagian peran di kampus X. *Jurnal Gender dan Pendidikan*, 16(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jgp.v16i1.2024>
- Biro Hukum.go.id. (2021). Peraturan Menteri Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Diakses tanggal 18 September 2025, dari <https://birohukum.kemendikdasmen.go.id/peraturan-menteri-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>.

- Candraningrum, D. (2014). *Body memories: Goddesses of Nusantara*. Jakarta: Jalasutra.
- Deaux, K., & LaFrance, M. (1998). Gender. In M. A. Hogg & D. Abrams (Eds.), *Social identifications: A social psychology of intergroup relations and group processes* (pp. 290–310). London: Routledge.
- Glick, P., & Fiske, S. T. (2001). An ambivalent alliance: Hostile and benevolent sexism as complementary justifications for gender inequality. *American Psychologist*, 56(2), 109–118. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.2.109>
- Hakiki, A & Mashuri, M. (2021). Seksisme sebagai moderator hubungan sense of community dan kinerja mahasiswa organisatoris. *Cognicia*, 9(2), 53-63.
- Himmah UII. (2024). *Maskulinitas toksik dalam kaderisasi organisasi mahasiswa*. Yogyakarta: Lembaga Pers Mahasiswa Himmah UII. <https://himmahuii.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. Jakarta: KemenPPPA. <https://kemenpppa.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). *Laporan survei kekerasan seksual di perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan PPKS*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Komnas Perempuan. (2025). Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Diakses tanggal 18 September 2025., dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>.
- Maiquisha, A. (2020). Determinan *sexism beliefs* pada perempuan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 101–112. Departemen Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Muhammad, N. (2025). Wujudkan Pendidikan Berkeadilan, UIN Syahada Gelar Workshop Responsif Gender. Diakses tanggal 18 September 2025, dari <https://www.uinsyahada.ac.id/wujudkan-pendidikan-berkeadilan-uin-syahada-gelar-workshop-responsif-gender/>.
- SAFEnet. (2024). *Laporan tahunan kekerasan berbasis gender online di Indonesia 2024*. Jakarta: SAFEnet. <https://safenet.or.id>
- Siti. (2025). Cegah Pelecehan Seksual: Kampus Aman Mulai dari Diri Sendiri. Diakses tanggal 18 September 2025, dari <https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/cegah-pelecehan-seksual-kampus-aman-mulai-dari-diri-sendiri/>.
- Universitas Wardmadewa. (2024). Inklusif dan Anti Diskriminasi. Diakses tanggal 18 September 2025, dari <https://www.warmadewa.ac.id/page/inklusif-dan-anti-diskriminasi>.
- Wulandari, D. (2024). Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual Di Kalangan Mahasiswa Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. (*Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry*).
- Zai, K. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Di Kota Pekanbaru. (*Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning*).